

## Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup>, Enwanda Nia Monika Br Sinaga<sup>2</sup>, Dicky Effendi<sup>3</sup>,  
Hwan Daniel<sup>4</sup>, Iin Sintia<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan  
dickyeffendi90@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aims to determine the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Medan City Government FY 2017-2021. This research uses a qualitative approach using Medan City Regional Income and Expenditure data 2017-2021. From the results of the discussion, it was found that the realization of Medan City's regional income still had not reached the set target, with the realization percentage below 100% during that period. The COVID-19 pandemic had a significant impact on regional income, especially in 2020, which caused a decrease in Original Regional Income and transfer income. Realization of Medan City regional spending tends to be below the budgeted budget, although there was an increase in 2019 and a decrease in 2020 due to the handling of the pandemic. Direct and indirect spending reflects the policies and strategies of the Medan City government in facing various challenges, especially related to handling the pandemic.*

**Keywords:** Regional Income and Regional Expenditures

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan T.A 2017-2021. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan 2017-2021. Dari Hasil pembahasan didapatkan bahwa Realisasi pendapatan daerah Kota Medan masih belum mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi di bawah 100% selama periode tersebut. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pendapatan daerah, terutama pada tahun 2020, yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Realisasi belanja daerah Kota Medan cenderung berada di bawah anggaran yang dianggarkan, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan penurunan pada tahun 2020 akibat penanganan pandemi. Belanja langsung dan tidak langsung mencerminkan kebijakan dan strategi pemerintah Kota Medan dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penanganan pandemi.

**Kata Kunci:** Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

### PENDAHULUAN

Anggaran adalah pendekatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. buat memastikan bahwa suatu anggaran efektif serta efisien, diperlukan pendekatan yang tulus dan kuat. Penggerak primer pasar sekunder artinya rasa ingin memahami, yang bertujuan buat menemukan pemasok berbiaya rendah buat usaha. Perbedaan antara sektor publik atau pemerintah dapat digunakan untuk mempertinggi

efektivitas program kerja sehingga sitasi pemerintah diselesaikan seakurat mungkin. Pengalokasian sumber daya yang harus dikembalikan ke masyarakat umum dan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun semaksimal mungkin menjadi bahan pengambilan keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Sesuai dengan undang-undang otonomi yang dituangkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah pusat bertanggung jawab buat menyediakan sarana dan kesempatan bagi setiap wilayah otonom buat secara mandiri menentukan kebutuhan masyarakat setempat serta kebutuhan pemerintah. prioritas. Melalui otonomi, daerah diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya serta menentukan bagiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). memakai dana Pemerintah pusat yang berada di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) buat mendukung proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan dan telah sebagai kekayaan nasional. pada rangka mempertinggi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah wajib memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan Laporan Realisasi aturan adalah buat memberikan gosip yang seksama tentang realisasi serta anggaran mengenai pemkot Medan. Penyandingan antara aturan serta realisasinya menunjukkan taraf ketercapaiannya tujuan yang telah ditambahkan peraturan-peraturan antara legislatif serta eksekutif. pada penganggaran, Jika medannya tidak mulus serta seragam, maka anggaran mampu menggunakan praktis dihilangkan. sang karena itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan wilayah, perlu adanya transparansi yang jelas mengenai bagaimana anggaran dan belanja dilaksanakan. pemda artinya organisasi publik yang mengawasi aktivitas pemerintahan negara. yang mengelola sumber daya yang berada pada wilayah tadi, memberi pelayanan masyarakat buat mencapai kesejahteraan hidup. istilah "asli daerah Pendapatan" (PAD) mengacu di pendapatan yang asal dari masing-masing negara bagian di daerah tersebut. waktu porsi PAD pada struktur moneter wilayah menurun, maka kemampuan wilayah pada melaksanakan proyek-proyek pembangunannya pula menurun (Mulya Firdausy, 2017).

Realisasi aturan Laporan memberikan berita tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan investasi Pemkot Medan yang dibandingkan satu sama lain. Realisasi anggaran menyampaikan gosip yang bermanfaat untuk meramalkan indikator-indikator ekonomi yang akan dipergunakan buat memitigasi dampak gempa bumi Medan pada tahun-tahun mendatang menggunakan pendekatan kooperatif dalam pelaporan data. Laporan Realisasi anggaran tersaji dengan menyoroti banyak sekali unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan buat penelitian yang bermakna. Mengingat peran krusial penyusunan aturan dalam perusahaan adalah suatu keharusan bagi setiap perencanaan serta pengendalian manajemen; maka manajemen perusahaan akan kehilangan keliru satu elemen penting pada implementasi fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan. Tanpa bersiap teknik persepsi dan menguasai penyusunan

anggaran. Desentralisasi pemerintahan nasional serta transparansi administrasi publik berarti bahwa pemerintah pusat wajib merancang sistem keamanan nasional yang efisien, efektif, serta sehat secara ekonomi. Kebijakan penting pada suatu daerah merupakan aturan Pendapatan dan Belanja daerah. Upaya dalam merealisasikan belanja yang sudah pasti tidak diragukan lagi pada wilayah ini demi kesejahteraan umum. Operasi dianggap efektif bila proses kegiatan mencapai tujuan dan titik akhir aturan (belanja secara bijaksana) dan rasionya paling sedikit 1 (seratus) persen. Indikator efektif memberikan kemajuan program terhadap tujuan serta yang akan terjadi serta penyimpangannya (Mardiasmo, 2009).

Sedangkan efisiensi diukur menggunakan membandingkan hasil yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kajian ini dilakukan atas nama Pemkot Medan pada lingkup Badan Pengelola Keuangan serta Aset wilayah. Hal ini karena tujuan Badan Pengelola Keuangan serta Aset daerah artinya buat memberikan evaluasi obyektif terhadap efektivitas dan efisiensi inisiatif pendapatan serta belanja wilayah. Hal inilah yang menghasilkan para peneliti tertarik, sehingga semangat untuk melakukan penelitian di Pemkot Medan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian akuntansi sektor publik dari Muindro Renyowijoyo (2012:1). “Akuntansi sektor publik ialah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik menjadi salah satu alat pertanggungjawaban pada publik”. sekarang terdapat perhatian yang makin luas terhadap praktik akuntansi yang dilakukan lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan juga lembaga publik non pemerintahan lembaga publik menerima tuntutan berasal masyarakat buat dikelola secara transparan serta bertanggung jawab.

### **Analisis Pendapatan**

Mahmudi (2006:121) pada rangka aplikasi swatantra daerah serta desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut buat mempunyai kemandirian keuangan daerah yang lebih akbar. menggunakan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti wilayah tak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. tetapi tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi menerima dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap dibutuhkan buat meningkatkan kecepatan pembangunan didaerah. meningkat taraf kemandirian keuangan maka wilayah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, serta sebagainya. oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan serta analisis pendapatan daerah menjadi sangat krusial bagi Pemerintah Daerah.

## Analisis Belanja

Mahmudi (2006:134) Analisis belanja daerah sangat krusial dilakukan buat mengevaluasi apakah Pemerintah Daerah sudah melakukan APBD secara hemat, efisien, serta efektif (*value for money*). Sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tak perlu serta pengeluaran yang tidak tepat target. menggunakan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat buat melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja absolut harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai Pemerintah Daerah. Pemerintah tak perlu lagi berorientasi buat menghabiskan anggaran yang menjadikan terjadinya pemborosan aturan, tetapi hendaknya berorientasi di hasil serta *outcome* asal aturan.

## Penelitian Terdahulu

Riska Korompot (2015), dalam penelitiannya berjudul Analisis Penyusunan aturan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan serta Aset daerah Kota Kotamobagu Tahun aturan 2014. Tujuannya buat mengetahui proses penyusunan aturan di DPPKAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014. Metode analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif. yang akan terjadi penelitian Diperoleh DPPKAD kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan aturan sesuai menggunakan Permendagri No.27 tahun 2013 perihal panduan penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum menyelesaikan proses penyusunan APBD pada daur anggaran daerah tetapi masih dalam bentuk baku operasional prosedur. perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian.

Penelitian oleh Komang Sri Endrayani (2014), dalam penelitiannya berjudul dampak Penerapan anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi perkara pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Tujuannya merupakan buat mengetahui dampak penerapan aturan berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah naratif. yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ketika penerapan aturan berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin akbar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. perbedaan menggunakan penelitian ini terletak pada objek penelitian

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data sekunder yang di dapatkan dari *website* Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang APBD pemerintah Kota Medan T.A 2017-2021 dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan

teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didapat dari penelitian tersebut dan memberikan beberapa saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendapatan Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas atas pajak daerah, dimana dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}} \times 100\%$$

#### Ketentuan:

1. Jika > 100% maka Sangat Ekonomis
2. Jika 90%-100% maka Ekonomis
3. Jika 80%-90% maka Cukup Ekonomis
4. Jika 60%-80% maka Kurang Ekonomis
5. Jika < 60% maka Tidak Ekonomis

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82
2018	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53	81,18
2019	6.257.239.035.331,00	5.518.772.179.306,31	88,19
2020	4.757.852.448.866,16	3.988.761.485.152,01	83,83
2021	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29	96,43

Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan

Pada tabel 1. merupakan hasil penelitian tentang realisasi pendapatan daerah Kota Medan (berupa, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah) selama periode tahun 2017- 2021. Pemerintah kota Medan belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Dapat di lihat anggaran dan realisasi pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2017 dengan persentase 79,82% masih belum mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan belum disiplin dalam menggunakan anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Hingga pada tahun 2018 anggaran di turunkan yang di ikuti oleh penurunan realisasi dengan persentase 81,18% yang terbilang mengalami peningkatan dalam pertumbuhan realisasinya, akan tetapi hal ini juga belum memenuhi target yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Akibat dari penurunan yang terjadi, pemerintah mencoba menaikkan kembali target anggaran pada tahun 2019 yang diikuti oleh peningkatan realisasi dengan persentase 88,19 %, namun, sayangnya pada periode akhir 2019 terjadi bencana pandemi Covid-19 yang

menyebabkan banyak kegiatan di segala bidang maupun sektor harus berhenti dilaksanakan, termasuk hal ini menjadi penyebab kurangnya pemasukan/penerimaan bagi daerah hingga di tahun 2020 anggaran di turunkan dan diikuti oleh penurunan realisasi dengan persentase 83,83 % yang disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer dari berlakunya PPKM dalam penekanan kasus Covid-19. Namun, setelah keadaan mulai kembali pulih dengan dibukanya berbagai cara instan yang tetap memberikan kebebasan beraktivitas lewat jejaring sosial, banyak kegiatan yang bisa dilakukan kembali khususnya dalam perekonomian, dan pada tahun 2021 anggaran dinaikkan dan diikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi dengan persentase 96,43%, walaupun sebenarnya dari tahun ke tahun realisasi anggaran pendapatan kota Medan masih belum tidak mencapai 100% sehingga dapat dikatakan kurang efektif.

## Belanja Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	5.546.733.964.019,40	4.394.045.824.264,53	79,21
2018	5.449.562.922.528,00	4.213.480.509.726,24	77,31
2019	6.302.963.592.428,05	5.059.387.661.308,01	80,27
2020	5.254.667.074.399,53	3.854.742.410.736,56	72,35
2021	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87	78,5

*Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan*

Pada tabel 2. Dapat dilihat bahwa dalam periode tahun 2017-2021 tentang realisasi belanja daerah pemerintahan Kota Medan (berupa belanja tidak langsung, dan belanja langsung) tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Persentase tahun 2017 sebesar 79,21%, tahun 2018 sebesar 77,31% termasuk dalam kategori baik karena frekuensi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja cukup rendah. Namun, pada tahun 2019 mencapai 80,27% disebabkan dari cepatnya tersebar Virus Covid-19 yang mengharuskan pemerintah siap siaga dalam menangani kasus yang dari waktu ke waktu memakan korban. Pada tahun 2020, realisasi belanja kembali menurun sebesar 72,35% dimana pemerintah terus melakukan optimalisasi realisasi belanja Kota Medan didorong oleh seluruh komponen di antaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial utamanya untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, realisasi belanja daerah 2021 naik menjadi 78,5% karena terlambatnya pembayaran ke pihak ketiga. Hal ini diakibatkan oleh perlambatan yang didorong oleh penurunan pada komponen belanja operasi seiring dengan terbatasnya realisasi belanja barang dan jasa, seperti pelaksanaan rapat dan *event* yang masih dilaksanakan virtual.

## Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah	%
2017	1.370.149.681.442,32	4.409.065.482.200,50	3,22
2018	1.636.204.514.683,53	4.253.618.758.532,53	2,60
2019	1.829.669.955.348,31	5.518.772.179.306,31	3,02
2020	1.509.831.081.747,01	3.988.761.485.152,01	2,64
2021	1.906.512.189.047,29	5.023.080.346.608,29	2,63

Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan

Tabel 3. menyatakan bahwa derajat desentralisasi Kota Medan setiap tahunnya tergolong kriteria sangat kurang yang berarti sangat kurangnya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2017 sebesar 3,22%, tahun 2018 sebesar 2,60%, tahun 2019 sebesar 3,02%, tahun 2020 sebesar 2,64%, dan tahun 2021 sebesar 2,63%. Tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Medan untuk menggali dan mengolah pendapatan masih dikatakan rendah sekali.

## Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

### Ketentuan:

Jika > 100% maka Sangat Efektif

Jika 90%-100% maka Efektif

Jika 80%-90% maka Cukup Efektif

Jika 60%-80% maka Kurang Efektif

Jika < 60% maka Tidak Efektif

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32	98,77
2018	1.511.000.000.000,00	1.312.070.185.618,00	86,83
2019	1.732.098.260.569,00	1.472.414.654.505,00	85
2020	1.359.509.068.000,00	1.195.850.162.642,00	87,96
2021	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	88,3

Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan

Tabel 4. di atas dapat dilihat rasio efektivitas pajak daerah yaitu tahun 2017 sebesar 98,77%, tahun 2018 sebesar 86,83%, tahun 2019 sebesar 85%, tahun 2020 sebesar 87,96%, dan tahun 2021 sebesar 88,3%. Persentase di atas dalam pemerintah Kota Medan cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerahnya. Dari

hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah potensi untuk pajak daerah selama tahun 2017 adalah tahun yang potensi penerimaan pajaknya sangat efektif dibandingkan tahun-tahun lainnya yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Namun, perlu diingat bahwa besarnya potensi yang ada pada pajak daerah tersebut masih harus dioptimalkan agar mencapai target dalam pajak daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Medan.

## Belanja Langsung

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persen (%)
2017	3.396.569.832.362,53	4.394.045.824.264,53	1,29
2018	3.455.113.095.305,68	4.213.480.509.726,24	1,22
2019	4.066.127.201.868,64	5.059.387.661.308,01	1,24
2020	2.076.255.354.959,86	3.854.742.410.736,56	1,86
2021	3.833.501.098.374,87	4.499.145.144.311,87	1,17

*Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan*

Berdasarkan tabel 5, total belanja langsung pemerintah kota medan (berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dari tahun 2017-2021 dinilai mengalami keterlambatan terutama di tahu-tahun pandemi yaitu pada tahun 2020-2021. realisasi belanja APBD pada triwulan III-2021 mengalami perlambatan didorong oleh penurunan pada komponen belanja operasi seiring dengan terbatasnya realisasi belanja barang dan jasa, seperti pelaksanaan rapat dan *event* yang masih dilaksanakan virtual. Selanjutnya, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui APBN ke Sumatera Utara turun hingga -6,0% (YoY) dari tahun 2020, dengan optimalisasi realisasi belanja triwulan III-2021 sebesar 62,0%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2020 sebesar 57,2%. Optimalisasi realisasi belanja APBN di Kota medan didorong oleh seluruh komponen di antaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial utamanya untuk penanganan pandemi COVID-19.

## Belanja Tidak Langsung

Tahun	Belanja tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persen (%)
2017	997.475.991.902,00	4.394.045.824.264,53	4,41
2018	753.996.886.210,07	4.213.480.509.726,24	5,59
2019	992.661.245.694,74	5.059.387.661.308,01	5,10
2020	1.778.487.055.776,70	3.854.742.410.736,56	2,17
2021	574.604.617.139,00	4.499.145.144.311,87	7,83

*Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan*

Pada Tabel 6, belanja tidak langsung Kota medan (berupa belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak

terduga) dengan persen tahun 2017 sebesar 4,41%, tahun 2018 sebesar 5,59%, tahun 2019 sebesar 5,10%, tahun 2020 sebesar 2,17% dan tahun 2021 sebesar 7,83%. Dan dari 5 tahun penelitian tersebut sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja pegawai.

## Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total realisasi belanja daerah}}{\text{Total realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

### Ketentuan:

Jika > 100% maka tidak efisien

Jika 90%-100% maka kurang efisien

Jika 80%-90% maka cukup efisien

Jika 60%-80% maka efisien

Jika < 60% maka sangat efisien

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
2017	5.546.733.964.019,40	4.394.045.824.264,53	79,21
2018	5.449.562.922.528,00	4.213.480.509.726,24	77,31
2019	6.302.963.592.428,05	5.059.387.661.308,01	80,26
2020	5.254.667.074.399,53	3.854.742.410.736,56	73,35
2021	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87	78,5

Sumber: Portal Pemkot Medan-Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel 7, realisasi belanja daerah di kota medan dapat dikatakan efektif dan efisien dikarenakan persentasenya di bawah 80% (efektif). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 total persentase realisasi belanja sebesar 79,21%, tahun 2018 sebesar 77,31%, tahun 2019 sebesar 80,26%, tahun 2020 sebesar 73,35% dan di tahun 2021 sebesar 78,5%. Efisiensi belanja kota medan pada tahun 2019 mendapat persentase sebesar 80,26 persen yang berarti tingkat efisiensinya dapat digolongkan cukup efisien (80%-90%), sisanya tergolong efektif meski beberapa hampir menyentuh angka 80%. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya pemerolehan PAD dengan realisasi penerimaan PAD, semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja suatu daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja kota medan dapat dikatakan dalam tahun 2017-2021 tergolong baik karena mendapat persentase rata-rata di bawah 80%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, dan efisiensi

belanja Pemerintah Kota Medan selama periode tahun 2017-2021, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pendapatan Daerah: Realisasi pendapatan daerah Kota Medan masih belum mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi di bawah 100% selama periode tersebut. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pendapatan daerah, terutama pada tahun 2020, yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer.
2. Belanja Daerah: Realisasi belanja daerah Kota Medan cenderung berada di bawah anggaran yang dianggarkan, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan penurunan pada tahun 2020 akibat penanganan pandemi. Belanja langsung dan tidak langsung mencerminkan kebijakan dan strategi pemerintah Kota Medan dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penanganan pandemi.
3. Derajat Desentralisasi: Derajat desentralisasi Kota Medan tergolong sangat rendah sepanjang periode 2017-2021, menunjukkan keterbatasan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
4. Efektivitas Pajak Daerah: Meskipun terjadi fluktuasi, rasio efektivitas pajak daerah Kota Medan cenderung cukup baik, dengan beberapa tahun mencapai angka di atas 85%. Pentingnya optimalisasi potensi pajak daerah untuk mencapai target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.
5. Efisiensi Belanja: Efisiensi belanja Kota Medan tergolong baik, dengan rata-rata persentase realisasi belanja di bawah 80% selama periode 2017-2021. Meskipun ada tahun di mana efisiensi belanja mendekati batas angka 80%, rata-rata menunjukkan tingkat efisiensi yang memadai.

## SARAN

1. Optimalisasi Pendapatan: Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan disiplin dalam mengelola anggaran dan mencari inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dalam mengatasi dampak pandemi yang masih berlanjut.
2. Penanganan Krisis: Perlu pengembangan rencana kontingensi yang lebih baik untuk menghadapi krisis, seperti pandemi, agar dampaknya terhadap pendapatan dan belanja daerah dapat diminimalkan.
3. Peningkatan Kewenangan Daerah: Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat lebih efektif mengelola pembangunan dan pendapatan daerah. Optimalisasi
4. Potensi Pajak: Terus melakukan optimalisasi potensi pajak daerah, termasuk peningkatan efektivitas dalam pengumpulan pajak dan peningkatan kualitas layanan pajak kepada masyarakat.
5. Pengelolaan Belanja: Terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan belanja, fokus pada efisiensi penggunaan anggaran, dan perhatian khusus pada

belanja langsung yang mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan Derajat Desentralisasi: Mengupayakan peran pemerintah daerah yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal dengan meningkatkan derajat desentralisasi. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dan lebih efektif dalam mencapai target pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/24/serapan-anggaran-rendah-pemkot-medan-sebut-pembayaran-ke-pihak-ketiga-terlambat>

Juliani. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.

Juwanda. 2021. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Kota Medan

Komang Sri Endrayan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). E-journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (<http://e-journal.undiksha.ac.id/article/view>). Diakses tanggal 06 Desember 2016.

Korompot, Rizka.dkk (2015). Analisa Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Tesis Magister. Manado, Universitas Sam Ratulangi

Laporan perekonomian provinsi.  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Utara-November-2021.aspx>

Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pandungan untuk eksekutif, DPRD dan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Muindro Renyowijoyo. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media

Tulanglow. andre, P, 2016, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, *Jurnal EMBA*, 4(3), 564-571